

PEMBUKUAN MENGGUNAKAN SAK ETAP DALAM MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN TERUTANG SESUAI PP NO. 55 TAHUN 2022

Andreas Bambang Daryatno¹, Aldian Salim² & Ryan Mathew Gunawan³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: andreasb@fe.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: aldian.115230176@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: ryanmgnwn@gmail.com

ABSTRACT

Micro, small and medium entrepreneurs (MSMEs) in preparing more effective financial reports can use simplified standards, namely the Financial Accounting Standards for Non-Public Accountable Entities (SAK ETAP). SAK ETAP also aims to encourage creditors to help MSME entrepreneurs with financial matters. In accordance with PP Number 55 of 2022, financial reports will also be used by MSMEs to calculate, calculate, declare and report their tax obligations, because tax benefits for MSMEs will end in 2024. This non-profit initiative aims to create a simple financial reporting format for MSMEs based on SAK ETAP. This community service was carried out at PT TGI, an MSME in the city of Jakarta which sells suitcases, briefcases and cosmetic bags online. Based on observations and interviews with employees, it is known that 1) MSMEs prepare financial reports but do not implement SAK ETAP; The financial accounting system is simple. 2) The reasons why SAK ETAP is not applied to MSMEs include the implementation of an MSME contribution system which requires recording for the last 3 years, and limited understanding of internal employees in preparing financial reports means a lack of accounting skills. This philanthropic activity is carried out using simple consulting, training and accounting techniques to ensure that MSMEs fulfill their tax obligations according to the books that have been prepared and their business operations remain smooth. Bookkeeping is prepared based on the fulfillment of tax obligations in accordance with SAK ETAP and regulations set by the government. Through community service activities, Tarumanagara University plays a direct active role in supporting the MSME sector and establishing links between the academic field and business world activities.

Keywords: MSMEs, SAK ETAP, Government Regulations

ABSTRAK

Pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih efektif dapat menggunakan standar yang sudah disederhanakan yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Non Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP juga bertujuan untuk mendorong kreditur untuk membantu pengusaha UMKM dalam hal keuangan. Sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022, laporan keuangan juga akan digunakan oleh UMKM untuk menghitung, memperhitungkan, menyatakan dan melaporkan kewajibannya, karena manfaat perpajakan bagi UMKM akan berakhir pada tahun 2024. Inisiatif nirlaba ini bertujuan untuk menciptakan format pelaporan keuangan sederhana bagi UMKM berdasarkan SAK ETAP. Pengabdian masyarakat ini dilakukan di PT TGI, sebuah UMKM di kota Jakarta yang menjual koper, tas kantor, dan tas kosmetik secara online. Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap pegawai diketahui bahwa 1) UMKM menyiapkan laporan keuangan namun tidak menerapkan SAK ETAP; Sistem akuntansi keuangan itu sederhana. 2) Alasan SAK ETAP tidak diterapkan pada UMKM antara lain karena sudah diterapkannya sistem iuran UMKM yang mewajibkan pencatatan selama 3 tahun terakhir, dan keterbatasan pemahaman karyawan internal dalam Menyusun laporan keuangan artinya kurangnya keterampilan akuntansi. Kegiatan filantropis ini dilakukan dengan menggunakan teknik konsultasi, pelatihan, dan akuntansi sederhana untuk memastikan UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai pembukuan yang telah disiapkan dan operasional bisnisnya tetap lancar. Pembukuan disusun berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai SAK ETAP dan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Tarumanagara berperan aktif langsung dalam mendukung sektor UMKM dan menjalin keterkaitan antara bidang akademik dengan kegiatan dunia usaha.

Kata kunci: UMKM, SAK ETAP, Peraturan Pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, akuntansi adalah pencatatan yang harus dilakukan dan teratur untuk mengumpulkan semua jenis data dan informasi keuangan, termasuk

kewajiban, pendapatan, harta, pengeluaran, dan modal. Untuk mengetahui jumlah sumbangan dan pemasukan barang dan jasa, Anda harus menyusun neraca dan kas harian, serta laporan laba rugi untuk periode tahun tertentu. Seni mencatat, mengklasifikasikan, dan merangkum transaksi keuangan dalam suatu organisasi untuk mengkomunikasikan informasi keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan efektif (Weygandt, Kieso, dan Kimmel, 2018). Indonesia memiliki standar pelaporan keuangan yang dibuat oleh satu badan, Ikatan Akuntan Indonesia. Ada empat standar pelaporan keuangan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 1

Diagram pelaporan keuangan



Sumber: web.iaiglobal.or.id

Berdasarkan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia (KSPKI), empat pilar SAK diterapkan di Indonesia. (a) Pilar 1 merupakan SAK internasional; (b) Pilar 2 adalah SAK Indonesia; (c) Pilar 3 adalah SAK Indonesia untuk Badan Usaha Swasta (EP) / SAK untuk Badan Akuntabilitas Publik (ETAP); dan (d) Pilar 4 adalah SAK Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM). SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan independen yang dapat digunakan oleh perusahaan yang mematuhi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (IAI, 2012). Kinerja pemilik dan aset dipisahkan dari aset perusahaan dan satu sama lain (IAI, 2012).

SAK EMKM merupakan standar yang disederhanakan untuk mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM. Dalam EMKM, pencatatannya hanya berdasarkan biaya historis, karena hanya biaya historis yang menjadi dasar penilaian. Ini membedakannya dari SAK lainnya. Perusahaan yang memenuhi persyaratan penerapan SAK EMKM juga harus memastikan bahwa ketentuan dalam SAK EMKM telah sesuai dan selaras dengan persyaratan pelaporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangan mana yang akan diadopsi. Perlu dipertimbangkan apakah SAK EMKM mudah digunakan atau apakah terdapat kebutuhan informasi yang tinggi di kalangan pengguna laporan keuangan perusahaan.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hanya merekam pemasukan dan pengeluaran kas, namun UMKM memisahkan pemasukan dan pengeluaran tersebut untuk menghitung laba. Selain itu, meskipun sudah bertahun-tahun beroperasi, terdapat usaha yang hanya mencatat pendapatan harian tanpa menyusun laporan keuangan yang jelas atau mengikuti standar akuntansi.

"Pada intinya, para pemangku kepentingan UMKM tidak memiliki pengetahuan dasar mengenai akuntansi karena proses akuntansi di dalam bisnis dijalankan oleh pegawai," (Fitrianai Saragih, Surikayanti, 2015). Para pengusaha UMKM tidak mampu membaca laporan yang diberikan oleh karyawan mereka. Jika pelaku UMKM hanya melakukan pencatatan standar atau tidak mampu membaca laporan yang diberikan oleh karyawan mereka, maka ada banyak risiko yang muncul, seperti kemungkinan penipuan dalam pencatatan, risiko kerugian karena kesalahan pencatatan, dan risiko lain yang paling besar ada pada pelaku UMKM. Sampai proyek selesai, hal ini akan berlanjut. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) dapat mengambil keputusan sewenang-wenang tanpa alasan yang masuk akal karena pelaporan keuangan yang sederhana tanpa mengacu pada standar akuntansi.

Selain itu, laporan keuangan yang berkaitan dengan SAK ETAP bermanfaat bagi masyarakat karena membantu pihak eksternal dalam pengambilan keputusan tentang entitas UMKM, memisahkan kepentingan usaha dan dana pribadi entitas UMKM, dan memfasilitasi pemasukan modal dari kreditur atau bank. Oleh karena itu, Standar Akuntansi Badan Usaha Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sangat penting untuk memudahkan pengambilan keputusan dan mencegah penipuan dan kerugian bisnis. Selain itu, SAK ETAP akan memungkinkan pemangku kepentingan UMKM untuk menyampaikan laporan keuangan, yang merupakan peran penting bagi perusahaan. Selain itu, pelaporan keuangan yang dibuat di bawah SAK ETAP akan membantu pelaku UMKM mendapatkan dana tunai dan pinjaman tambahan dari bank.

Sesuai PP 55 Tahun 2022, UMKM yang sebelumnya menggunakan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% harus beralih ke metode akuntansi tersebut. Bagi UMKM yang berbentuk perseroan terbatas (PT), batas waktunya adalah tiga tahun. Bagi UMKM yang berbentuk koperasi, perseroan, dan persekutuan komanditer (CV), batas waktunya adalah empat tahun, dan khusus untuk UMKM perorangan, batas waktunya adalah tujuh tahun. Tentunya bagi UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum tahun 2018, maka jangka waktunya dihitung mulai tahun 2018 saat berlakunya PP 23/2018. Sedangkan bagi UMKM yang baru memperoleh NPWP setelah tahun 2019, jangka waktunya dihitung sejak tahun pendaftaran sebagai wajib pajak. Di bawah ini adalah contohnya: Jika pengusaha UMKM perorangan hanya memiliki satu NPWP pada tahun 2020, maka manfaat pajak sebesar 0,5% berlaku selama tujuh tahun pajak hingga tahun 2026. Tahun 2024 akan menjadi tahun terakhir dari tujuh tahun bagi UMKM perorangan yang telah merasakan manfaat pajak 0,5% sejak tahun 2018. Mulai Januari 2025 dan seterusnya, tarif pajak 0,5% tidak berlaku lagi dan tarif pajak progresif akan berlaku sesuai pasal 17 UU PPh.

PT Tour Gear International (PT TGI) yang baru berdiri pada Oktober 2022 memanfaatkan masa keringanan pajak UMKM. Sesuai aturan yang berlaku saat ini, yakni PP 23 Tahun 2018 yang diperbarui dengan PP Nomor 55 Tahun 2022, pelaku UMKM wajib beralih ke penerapan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang Pajak Penghasilan Umum dengan membuat pencatatan akuntansi. Oleh karena itu, para pimpinan UMKM meminta bantuan kepada PKM Universitas Tarumanagara untuk menyiapkan rekening berdasarkan SAK ETAP dan memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan tarif pajak umum berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Melalui PKM ini diharapkan pelaku UMKM mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha harus menyiapkan neraca dan laporan laba rugi untuk menghitung pajak penghasilan yang harus mereka bayarkan ke kas negara. Melalui prosedur akuntansi yang disusun dengan baik, dunia usaha dapat memotong atau memungut dan

menyetorkan pajak, karena tidak ada kemungkinan penghindaran pajak karena integrasi dan digitalisasi perpajakan yang berlaku.

PKM ini merupakan topik yang berkaitan dengan Peta Jalan PKM Rencana Induk Penelitian Universitas Tarumanagara yaitu PKM Unggulan 6 yang menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Dalam dunia bisnis, tidak hanya perusahaan tertentu atau perusahaan yang menghasilkan penjualan secara manual yang membayar pajak. Perusahaan UMKM yang memanfaatkan masa keringanan pajak harus beralih dan sudah saatnya menggunakan PPh umum yang berlaku berdasarkan pembukuan yang disiapkan perusahaan. PKM termasuk dalam lingkup perpajakan di bidang perekonomian khususnya kewirausahaan yang bertujuan untuk meningkatkan dunia usaha dan menunjang perekonomian nasional. Setiap kegiatan dan kegiatan usaha erat kaitannya dengan kewajiban perpajakan. Selain itu, melalui pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah melaksanakan kebijakan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan sistem yang terintegrasi.

Tujuan dari kegiatan pelatihan dan konsultasi ini adalah untuk membuat perhitungan dengan bantuan SAK ETAP dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang sesuai PP No 55 Tahun 2022. PT Tour Gear International dan perusahaan UMKM lainnya khususnya yang beroperasi secara online, ini berfungsi sebagai model praktis untuk memenuhi kewajiban pajak Anda dengan benar. Tujuan kegiatan perkuliahan, di Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Tarumanagara yaitu: sebagai tambahan dari modul pengajaran atau sebagai bahan referensi tambahan pada mata kuliah “Dasar-Dasar Akuntansi, Perpajakan Industri Khusus, Akuntansi Perpajakan dan Perpajakan”. Tujuan bagi Mahasiswa diharapkan memahami bahwa perusahaan UMKM seperti PT Tour Gear International yang telah mendapatkan manfaat insentif pajak selama tiga tahun telah beralih ke pajak penghasilan umum dan wajib menyiapkan laporan keuangan dengan adanya Pengabdian kepada Masyarakat dari Universitas Tarumanagara, maka akan menciptakan sinergi yang lebih nyata antara dunia pendidikan dan dunia usaha dengan memberikan nasihat dan bantuan mengenai kewajiban pembuatan pembukuan dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dimana kedua belah pihak dapat saling maju dan mengambil manfaat atas kegiatan ini.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Cara pelaksanaan kegiatan adalah melalui pemberian pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP dan perhitungan kewajiban perpajakan berdasarkan buku-buku yang disusun oleh pelaku usaha UMKM. Berhubungan dengan departemen internal PT Tour Gear International mulai dari departemen penjualan, pembelian, dan keuangan dengan mencatat setiap transaksi berdasarkan bukti-bukti yang diberikan. Data apa saja yang harus disiapkan agar proses pelatihan dapat berjalan maksimal dan lancar? Untuk membantu mencapai hal tersebut, telah dibuat pedoman dasar dan sederhana dalam penyusunan laporan keuangan dan contoh penghitungan kewajiban perpajakan berdasarkan laba rugi. Hal ini diharapkan memungkinkan pemilik usaha untuk lancar melakukan pelaporan keuangan dan memenuhi kewajiban perpajakan tanpa mengganggu atau berdampak pada tingkat operasional usaha.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah: (a) Mengadakan pertemuan dengan Bapak Iwan Hendrawan Direktur UMKM dan karyawan untuk membahas kebutuhan berdasarkan pengetahuan karyawan; (b) Menentukan tanggal dan waktu konsultasi dan pelatihan; (c) Menyiapkan materi dan jumlah karyawan yang akan mengikuti pelatihan; (d) Gandakan materi tergantung jumlah karyawan yang ingin mengikuti proses pelatihan; (e) Kegiatan PKM dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati; dan (f) Praktek menyusun laporan keuangan

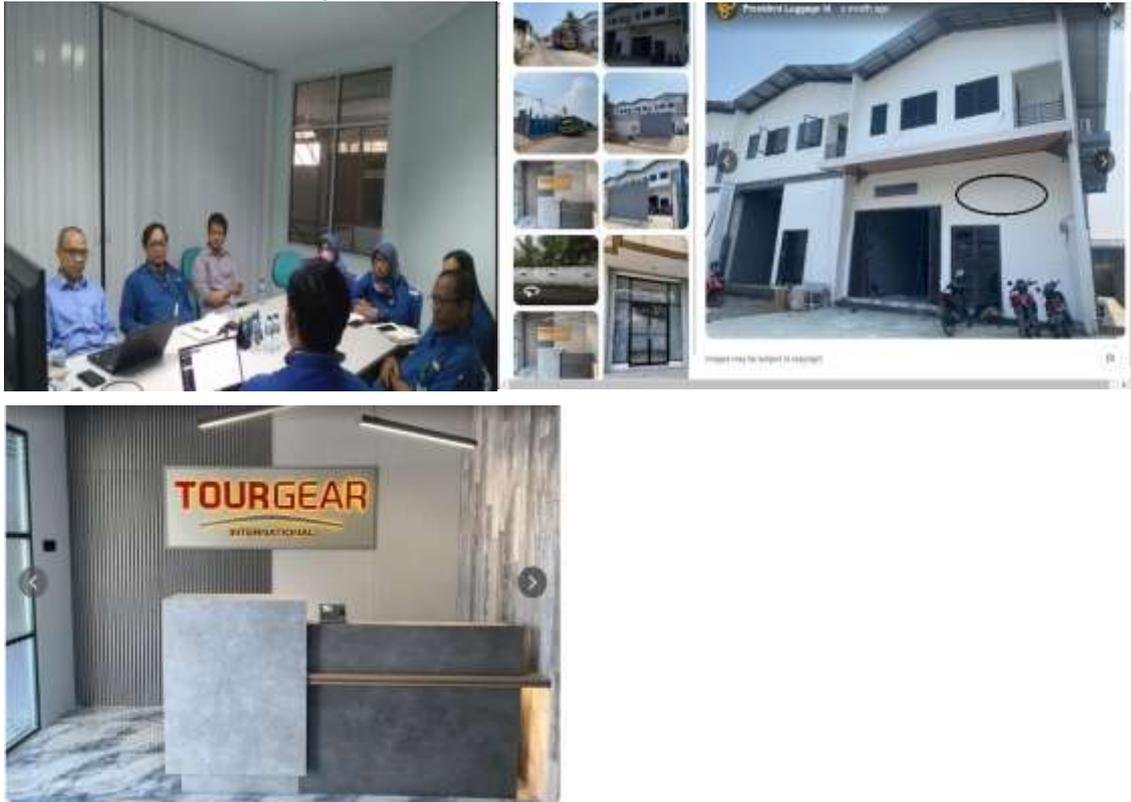
berdasarkan SAK ETAP dan menghitung pajak penghasilan umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Evaluasi Mitra

Partisipasi mitra dengan menyediakan titik pertemuan, PC atau laptop, dan peralatan jaringan (jika tersedia), diperlukan koneksi ke server DJPonline. Karyawan diorganisasikan ke dalam beberapa tim sebagai bagian dari pelatihan mereka dalam menyiapkan laporan keuangan dan menghitung kewajiban pajak.

Gambar 1

Peta Lokasi dan Foto kegiatan PT TGI



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT TGI adalah UMKM yang berdiri pada akhir tahun 2022 dan bergerak sebagai perusahaan dagang yang menjual tas dan koper secara online. Selama ini, semua transaksi sudah dilakukan pencatatan dan berkaitan dengan kewajiban perpajakan, Perusahaan menggunakan PPh final tarif UMKM sebesar 0,5% x Peredaran bruto sesuai dengan PP No 23 Tahun 2018 diperbaharui melalui PP 55 Tahun 2022. PT TGI sesuai peraturan diatas, hanya diperkenankan menggunakan PPh Final UMKM selama 3 tahun artinya Tahun 2024 adalah tahun terakhir dan tahun 2025 perusahaan UMKM diharuskan menggunakan pembukuan dengan tarif umum sebesar 22%. Perusahaan UMKM masih dapat memanfaatkan fasilitas lain yang diberikan oleh pemerintah yaitu sesuai pasal 31E dimana penjualan s/d Rp 4.800.000.000 mendapatkan keringanan sebesar 50% atau $22\% \times 50\% = 11\%$.

PT TGI adalah perusahaan kecil-menengah, jadi mereka hanya perlu membuat laporan keuangan yang sederhana. Pemangku kepentingan UMKM menyadari pentingnya pencatatan akuntansi. Namun, mereka kurang memahami akuntansi, sehingga sulit melakukan pencatatan akuntansi. Selain itu, standar akuntansi adalah Standar Akuntansi Keuangan Badan Usaha Tanpa

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Standar tersebut dianggap terlalu sulit untuk diterapkan pada UMKM karena dianggap terlalu rumit dan tidak memenuhi persyaratan pelaporan keuangan. Lima laporan keuangan harus dibuat, yang terdiri dari laporan pengelolaan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) (Dwi Martini et al., 2016). Laporan keuangan adalah produk akhir dari siklus akuntansi yang diproses oleh sistem akuntansi dan menjadi informasi pelaporan yang harus dimiliki oleh UMKM. Jika seorang pelaku UMKM ingin memberikan modal kepada investor untuk mengembangkan usahanya, kebiasaan mencatat semua transaksi usaha dan menyusun laporan keuangan harus dibudayakan. Ini akan memungkinkan para pengusaha kecil untuk mengevaluasi usahanya dan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan ini dapat digunakan untuk tujuan pelaporan. Dari diskusi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap pengusaha mikro harus memiliki laporan keuangan, seperti halnya usaha kecil dan menengah (UMKM). Hambatan utama untuk menyusun laporan keuangan dengan SAK ETAP adalah waktu yang terbatas dan kekurangan sumber daya manusia di bidang akuntansi, yang menyebabkan UMKM tidak memiliki pencatatan keuangan dengan SAK ETAP.

Penyusunan Pembukuan yang menghasilkan Laporan Keuangan

Dalam Menyusun laporan keuangan, kita mengenal siklus akuntansi dimana Tahapan dalam siklus akuntansi menurut Soemarso, 2015 terdiri dari:

- 1) Transaksi merupakan perjanjian antara pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran barang atau layanan;
- 2) Jurnal adalah catatan yang merangkum kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertukar barang atau layanan;
- 3) Posting adalah langkah dalam pencatatan akuntansi yang mencakup pemindahan data dari jurnal ke dalam buku besar;
- 4) Neraca saldo sebelum penyesuaian adalah rincian saldo khas yang disusun setelah semua transaksinya telah dicatat serta diposting ke buku besar; dan
- 5) Penyesuaian adalah perjanjian antara penjual dan pembeli yang berhubungan dengan pertukaran barang atau layanan; dan
- 6) Neraca Saldo Setelah Penyesuaian: Ini mencerminkan semua akun dan saldo yang terdapat di buku besar setelah penyesuaian entri dicatat untuk periode akuntansi.
- 7) Laporan Keuangan merupakan ringkasan informasi finansial suatu perusahaan selama waktu tertentu yang bisa digunakan untuk menunjukkan kondisi kinerja perusahaan itu. Secara sederhana, laporan keuangan adalah dokumen penting yang mencatat transaksi dan kas perusahaan.
- 8) Jurnal Penutup adalah salah satu elemen dalam laporan keuangan yang disiapkan pada akhir periode akuntansi; dan
- 9) Neraca Saldo Setelah Penutup adalah neraca saldo yang dimiliki oleh perusahaan setelah akhir periode pencatatan tersebut.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik (SAK ETAP) yang menyeluruh meliputi neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan yang menyertai laporan keuangan. Laporan Posisi Keuangan: Sesuai dengan SAK-ETAP (2016), Laporan Posisi Keuangan menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas sebuah entitas pada akhir periode tertentu. Laporan Posisi Keuangan setidaknya harus mencakup: kas dan setara kas, piutang usaha serta piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tak berwujud, utang usaha, aset dan kewajiban terkait pajak, serta ekuitas.

Tabel 1
Laporan Posisi Keuangan

PT Tour Gear International		
Laporan Posisi Keuangan		
31 Agustus 2024 dan Juli 2024		
	31 Agustus 24	31 Juli 2024
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
Piutang Dagang	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Beban di bayar dimuka	xxx	xxx
TOTAL ASET LANCAR	XXX	XXX
ASET TIDAK LANCAR		
Aktiva Tetap	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	XXX	XXX
JUMLAH ASET	XXX	XXX
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN LANCAR		
Hutang Bank	xxx	xxx
Hutang Usaha	xxx	xxx
Uang Muka Penjualan	xxx	xxx
Hutang Pajak	xxx	xxx
TOTAL KEWAJIBAN LANCAR	XXX	XXX
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR		
Hutang Bank Jangka Panjang	xxx	xxx
TOTAL KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	XXX	XXX
EKUITAS		
Modal Saham	xxx	xxx
Laba Ditahan	xxx	xxx
Laba Tahun Berjalan	xxx	xxx
TOTAL EKUITAS	XXX	XXX
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	XXX	XXX

Laporan Laba Rugi: Laporan laba rugi dari PT Tour Gear International menyampaikan data mengenai pendapatan, biaya finansial, kewajiban pajak, serta keuntungan atau kerugian bersih (SAK-ETAP, 2016). Data yang disajikan oleh pemilik dan tim keuangan serta catatan keuangan yang disusun oleh tim keuangan harus diselaraskan dengan SAK-ETAP (2016).

Tabel 1
Laporan Laba Kas

PT Tour Gear International		
Laporan Laba Rugi		
31 Agustus 2024 dan Juli 2024		
Keterangan	31 Agustus 2024	31 Juli 2024
Penjualan	xxx	xxx
Retur Penjualan	(xxx)	(xxx)
Diskon Penjualan	(xxx)	(xxx)
Jumlah Penjualan Bersih	XXX	XXX
Harga Pokok Penjualan		
Persediaan Awal barang Dagang	xxx	xxx
Pembelian Persediaan Barang Dagang (Net)	xxx	xxx
Persediaan Akhir barang Dagang	(xxx)	(xxx)
Jumlah Harga Pokok Penjualan	XXX	XXX
Beban Operasional		
Beban Pengiriman	xxx	xxx
Beban Promosi	xxx	xxx
Beban Sewa	xxx	xxx
Beban Gaji	xxx	xxx
Beban THR	xxx	xxx
Beban Makan dan Minum	xxx	xxx
Beban Pajak	xxx	xxx
Beban Telp dan Komunikasi	xxx	xxx
Beban Administrasi Bank	xxx	xxx
Total Beban Operasional	XXX	XXX
Laba/Rugi Operasi	XXX	XXX
Pendapatan dan Beban Lainnya		
Pendapatan Lain-Lain	xxx	xxx
Beban Lain-Lain	(xxx)	(xxx)
Jumlah Pendapatan dan Beban Lainnya	XXX	XXX
Laba/Rugi Bersih Sebelum Pajak	XXX	XXX
Pajak Penghasilan	(xxx)	(xxx)
Laba/Rugi Bersih Setelah Pajak	XXX	XXX

Laporan Aliran Kas memperlihatkan variasi dalam uang tunai dan setara tunai dari suatu entitas secara terpisah selama satu periode dari kegiatan operasional, investasi, serta pendanaan (SAK ETAP, 2016:23).

Tabel 2
Laporan Arus Kas

PT Tour Gear Internasional		
Laporan Arus Kas		
Dari Periode Juli 2024 s/d Agustus 2024		
Keterangan	Agustus 2024	Juli 2024
Aktifitas Operasi		
Laba/Rugi	xxx	xxx
Tambah Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
Tambah Utang Usaha	xxx	xxx
Tambah Liabilitas Jangka Pendek	xxx	xxx
Kurang Piutang Usaha	xxx	xxx
Kurang Persediaan	xxx	xxx
Kurang Aset Lancar Lainnya	xxx	xxx
Total Aktifitas Operasi	xxx	xxx
Investasi		
Kurang Aset Tetap	xxx	xxx
Kurang Aset Lainnya	xxx	xxx
Total Investasi	xxx	xxx
Pendanaan		
Tambah Liabilitas Jangka Panjang	xxx	xxx
Tambah Modal	xxx	xxx
Total Pendanaan	xxx	xxx
Total dari Arus Kas Bersih yang digunakan (dipakai) di periode ini	xxx	xxx
Kas & Setara Kas di Awal period	xxx	xxx
Kas & Setara Kas di Akhir period	xxx	xxx

Laporan perubahan ekuitas menunjukkan keuntungan atau kerugian perusahaan selama satu periode, baik ekuitas awal periode maupun ekuitas akhir periode pelaporan. Peneliti membuat laporan perubahan modal menggunakan laporan perubahan ekuitas selama periode akuntansi. Laporan dibuat dari data yang diperoleh sebelumnya dan kemudian diproses sesuai dengan standar pelaporan yang ditetapkan dalam SAK-ETAP (2016).

Tabel 3
Laporan Perubahan Ekuitas

PT Tour Gear Internasional		
Laporan Perubahan Ekuitas		
Dari Periode Juli 2024 s/d Agustus 2024		
Keterangan	Agustus 2024	Juli 2024
Saldo Awal	xxx	xxx
Laba Bersih Setelah Pajak	xxx	xxx
Pembagian Dividen	xxx	xxx
Total Perubahan Ekuitas	xxx	xxx
Saldo Akhir	xxx	xxx

Catatan pada Laporan Keuangan berasal dari informasi yang dihimpun oleh perusahaan, yang kemudian telah direvisi oleh peneliti agar sesuai dengan ketentuan SAK-ETAP (2016). Nota ini mencakup penjelasan bahwa laporan telah disusun sesuai standar SAK-ETAP, ringkasan kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan, serta dasar pengukuran yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Perhitungan dan penyetoran pajak yang berkaitan dengan transaksi dilakukan oleh karyawan PT TGI, yang menghasilkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Sebagai contoh untuk perhitungan pajak penghasilan atau laba fiskal PT TGI harus melakukan angsuran PPh 25 dan penyelesaian kurang bayar atau lebih bayar dengan PPh pasal 29 atau 28A, atas transaksi sewa kantor, maka PT TGI harus potong PPh final 4.2, atas transaksi pemberian jasa kepada pihak lain maka harus potong PPh 23. Sesuai dengan pembukuan yang dilakukan secara rinci dan jelas, maka wajib pajak harus melakukan perhitungan dan pemotongan kemudian menyetorkannya ke kas negara. Hal tersebut sangat berbeda dengan kewajiban perpajakan sebelumnya, yaitu menggunakan tarif UMKM final sebesar 0,5% dan hanya dilakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi, hal ini memungkinkan ada yang terlewatkan dan akan sangat sulit memberikan bukti atas pemotongan/pemungutan pajak jika dilakukan pemeriksaan pajak.

4. KESIMPULAN

PKM sudah dilaksanakan, dan dari pelatihan dan pelatihan bagi UMKM PT TGI, maka dapat ditarik beberapa pedoman penting dan baku yaitu: (a) Dalam menyusun laporan keuangan yang baik, Ikatan Akuntan Indonesia memberikan pedoman sederhana bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) yaitu Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP); (b) Selama ini pemenuhan kewajiban perpajakan PT TGI menggunakan tarif UMKM sesuai PP 23 Tahun 2018 dan diperbaharui PP 55 Tahun 2022 yang memperbolehkan melakukan pencatatan. Masa penggunaan tarif UMKM sudah habis tahun 2024 ini dan tahun depan 2025 harus beralih ke pembukuan dan akan dikenakan tarif PPh umum sesuai pasal 17 UU PPh; (c) Dalam penyusunan pembukuan yang menghasilkan laporan keuangan, sudah dibuatkan prosedur dan urutan dasar dan sederhana sehingga karyawan Perusahaan UMKM dapat dengan mudah memahaminya; Melalui penyusunan pembukuan lebih awal, secara langsung karyawan dapat membiasakan diri untuk memperhatikan setiap transaksi dan setiap obyek pajak yang harus di hitung maupun harus dipotong sesuai dengan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia, yaitu *Self Assesment system* dan *withholding tax system*; (d) Dengan adanya pendampingan dan pelatihan penyusunan pembukuan bulan Juli 2024 dan Agustus 2024, pihak Perusahaan UMKM dapat melanjutkan untuk bulan-bulan berikut sebagai persiapan tahun 2025; (e) Kewajiban perpajakan dapat dijalankan dengan baik jika laporan keuangan sudah disusun sesuai standar, jika ada pemeriksaan pajak nantinya maka petugas pajak juga akan melihat berdasarkan pembukuan yang sudah dibuat oleh Perusahaan UMKM; dan (f) laporan keuangan perlu disusun sesuai dengan SAK-ETAP, yang mencakup Catatan Laporan Keuangan, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, serta Laporan Perubahan Ekuitas

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Kegiatan PKM telah selesai dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara atas dukungannya terhadap dana dan kepada pimpinan Universitas Tarumanagara yang telah mengajak saya untuk mendukung PT TGI. Pihak manajemen juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Tarumanagara dengan menyediakan dosen untuk memberikan arahan penyusunan pembukuan berdasarkan SAK ETAP dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi untuk penghitungan pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Sebagai dosen Universitas Tarumanagara, saya mengucapkan terima kasih kepada PT TGI yang telah mempercayai saya untuk memberikan konsultasi akuntansi berdasarkan standar SAK ETAP sekaligus melakukan penyesuaian

implementasi penyusunan laporan keuangan dengan perpajakan yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025

REFERENSI

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta : Dewan Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2016. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2012. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Dewan Akuntansi Keuangan.
- Kieso, D., Weygandt, J., & Warfield. (2018). Intermediate Accounting IFRS Edition Third Edition. Singapore: Wiley.
- Saragih, Fitriani. Surikayanti. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi dan Keseuaiannya Dengan SAK ETAP pada UKM Medan Perjuangan. Jurnal : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Undang – Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Warren, Carl S. Reeve, James M. Duchac, Jonathan E. Suhardianto, Novrys. Kalanjati, Devi Sulisty, Jusuf, Amir Abadi. Djakman, Khaerul D. 2014. Pengantar Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat.